

**PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI KABUPATEN DELI SERDANG**

Yuda Sagita

NPP. 29.1666

Asdaf Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: netherblade46@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): (Contains the background behind the research) As an archipelagic country with the largest number of ethnicities and religions in the world, Indonesia is a multicultural and multi-religious country that currently influences the democratic process in Indonesia, one of which is the Regional Head Election. Deli Serdang Regency itself is an area with very diverse geographical conditions. Starting from the coast to mountainous areas, it will certainly have an influence in the process of holding the election. In this research. **Purpose:** the purpose of this study is to determine the role of the General Election Commission of Deli Serdang Regency in increasing the low political participation of the people in the 2018 simultaneous regional elections in Deli Serdang Regency and what factors hinder people's political participation. **Methods:** In this study the researcher used a qualitative method with a descriptive approach, in finding and collecting data the researchers used interviews, documentation, and Audio Visual. The theory used in this thesis is role theory according to Soerjono Soekanto in Role Theory (2002) which states that there are 4 dimensions in the role, namely dynamic aspects of position, set of rights and obligations, social behavior of position holders and part of the activities played. **Results/Findings:** geographical conditions are a problem in carrying out the duties of the General Election Commission itself, and there are also factors that hinder people's political participation in elections such as level of knowledge, community work, level of education, role of government officials, influence of intellectuals, and conflicts between leaders. **Conclusion:** The results of the study indicate that the role of the KPU in organizing the Pilkada has been going well but in the implementation of the election it is due to geographical conditions, personal busyness, lack of political understanding and candidates who do not socialize with the community. To overcome this problem, the KPU can hold more outreach to the community, especially in remote areas and educate candidates about the importance of campaigning for the community.

Keywords: Role, General Election Commissions, Regional Head Election

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi *background* yang melatarbelakangi penelitian) Sebagai negara kepulauan dengan jumlah suku dan agama terbanyak di dunia, Indonesia merupakan negara multikulturalisme dan multi agama yang dewasa ini mempengaruhi proses demokrasi di Indonesia yang salah satunya adalah Pemilihan Kepala Daerah. Kabupaten Deli Serdang sendiri merupakan daerah dengan kondisi geografis yang sangat beragam. Dari mulai pesisir pantai hingga daerah pegunungan tentunya akan berpengaruh dalam proses penyelenggaraan pemilihan tersebut. Dalam penelitian ini. **Tujuan:** tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang rendah pada pilkada serentak tahun 2018 di Kabupaten Deli Serdang dan faktor – faktor apa saja yang menghambat partisipasi politik masyarakat. **Metode:** Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dalam mencari dan mengumpulkan data peneliti menggunakan cara wawancara, dokumentasi, dan Audio Visual. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori peranan menurut Soerjono Soekanto dalam Teori Peranan (2002) yang menyebutkan bahwa terdapat 4 dimensi dalam peranan yaitu aspek dinamis dari kedudukan, perangkat hak-hak dan kewajiban, perilaku sosial dari pemegang kedudukan serta bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang **Hasil/Temuan:** keadaan geografis menjadi masalah tersendiri dalam pelaksanaan tugas dari Komisi Pemilihan umum itu sendiri, dan juga ada faktor – faktor menghambat partisipasi politik masyarakat dalam pilkada seperti tingkat pengetahuan, pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan, peran aparat pemerintahan, pengaruh kaum intelektual, dan konflik diantara pemimpin. **Kesimpulan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan KPU dalam penyelenggaraan Pilkada sudah berjalan dengan baik namun pada pelaksanaan pemilihan dikarenakan kondisi geografis, kesibukan pribadi, kekurangan pemahaman politik dan kandidat calon yang kurang bersosialisasi terhadap masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut KPU dapat lebih banyak mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat terutama di daerah yang terpencil dan edukasi kepada kandidat calon tentang pentingnya kampanye terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Peranan, Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari rakyat, sudah menjadi kontroversi sejak Yunani kuno, secara istilah demokrasi berarti kekuasaan ada di tangan rakyat, jadi rakyat berdaulat dan rakyat berkuasa. Negara Indonesia mendukung kedaulatan rakyat (demokrasi), pemilik kekuasaan tertinggi sebenarnya adalah rakyat, jadi kekuasaan adalah milik rakyat karena berasal dari rakyat, milik rakyat, dan milik rakyat. Melalui sistem ketatanegaraan yang berdasarkan konstitusi, pelaksanaan kedaulatan rakyat dibimbing dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ketatanegaraan (demokrasi konstitusional) yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan konstitusi. Jika sistem politik yang ada menggunakan konsep demokrasi, maka dapat dikatakan negara tersebut merupakan negara demokrasi. Indonesia setelah memasuki era reformasi mempercayai bahwa demokrasi adalah konsep yang paling relevan untuk menerapkan sistem politiknya. Demokrasi menguraikan kegunaan keterbukaan wadah kompetitif demi memenangkan posisi politik, dan memberikan ruang bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam politik. Demokrasi merupakan konsep yang positif, karena demokrasi dapat membawa keadilan bagi semua orang. orang dapat mengekspresikan keinginan mereka secara bebas di sini. Demokrasi dicirikan oleh adanya tiga syarat, yaitu kemampuan melawan dan mempertahankan hak, keikutsertaan masyarakat, dan perlindungan hak sipil dan politik. Dalam hal ini, sistem demokrasi memerlukan sistem pemilu yang

merupakan perangkat kelembagaan utama untuk memenuhi ketiga syarat tersebut. Melalui sistem ini Anda dapat melihat persaingan, partisipasi, dan perlindungan hak politik. Indonesia sebagai negara hukum memiliki konsekuensi berupa adanya supremasi hukum. Artinya, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada selain harus memberikan kepastian hukum (asas legalitas). Sistem demokrasi yang berdasarkan hukum dan kedaulatan bangsa merupakan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan di Indonesia menyatakan bahwa suatu pemerintahan dijalankan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Bentuk pengamalan dari sistem demokrasi adalah dilaksanakannya Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) secara langsung. Sebagai bentuk kewajiban masyarakat dalam kelanjutan kehidupan bernegara yakni keikutsertaan Warga Negara Indonesia dalam menyukseskan pemilihan umum. Momen pemilu sangat di perlukan partisipasi politik masyarakat dikarenakan pemilu berkaitan dengan seberapa banyak masyarakat ikut serta di dalam pemilihan umum. Ikut sertanya masyarakat pada pelaksanaan pemilihan umum karena keberlangsungan hidup negara akan dipengaruhi oleh seorang calon yang akan menduduki jabatan tertentu. Melihat angka partisipasi politik masyarakat yang terjadi di Indonesia, Kabupaten Deli Serdang termasuk dalam daerah dengan tingkat partisipasinya rendah. Pada pilkada tahun 2013 saja tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Deli Serdang sangat rendah yaitu hanya 37 persen. Untuk pilkada tahun 2018 partisipasi pemilih mengalami kenaikan menjadi 720.096 atau 61,77 persen, pemilih yang tidak berpartisipasi 445.673 pemilih atau 38,23 persen. Pasangan calon Ashari Tambunan – M Ali Yusuf Siregar mendapatkan 538.238 suara atau 82,52 persen. Mereka bersaing dengan kolom kosong yang meraih 114.258 atau 17,14 persen dan suara tidak sah sebanyak 71.582 suara. Berdasarkan uraian diatas tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan. Dimana pada pilkada tahun 2013 hanya mencapai tergolong sangat rendah kemudian pada pilkada tahun 2018 mengalami peningkatan walau belum mencapai target partisipasi nasional yaitu 77,5 persen.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan data partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Deli Serdang ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya keikutsertaan masyarakat Deli Serdang pada pelaksanaan pilkada tahun 2018. Faktor utamanya adalah sikap apatis masyarakat dalam menentukan pilihan. Penyebab sikap apatis terlihat jelas pada setiap individu, antara lain matinya nilai nilai dalam masyarakat, matinya rasa peduli satu sama lain, hilangnya rasa hormat atau hati nurani, dan pandangan keadilan yang membuat masyarakat buta terhadap hukum. Tindakan apatis ini kerap kali hadir dalam kehidupan bermasyarakat, politik dan pemerintahan. Sikap ini memaksa masyarakat Deli Serdang untuk menghilangkan niat mereka untuk memilih Kepala Daerah. Untuk menghindari rendahnya partisipasi politik masyarakat pada pemilu Kabupaten Deli Serdang, Komisi Pemilihan Umum dituntut lebih aktif dalam mengadakan sosialisasi-sosialisasi tentang politik di tengah masyarakat agar mereka terdorong untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemilu. Penyelenggaraan sosialisasi politik dengan tema yang membahas tentang pemilu akan membuat masyarakat mendapat pengetahuan yang lebih tentang pemilu. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum ditegaskan peran Komisi Pemilihan Umum dalam mengadakan sosialisasi politik tepatnya pada pasal 8 ayat 1 yaitu : pada huruf q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat, dan melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat. Ada catatan penting pada pelaksanaan pilkada tahun 2013 yaitu tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang sangat rendah sekitar 37 persen. Kemudian pelaksanaan pilkada tahun 2018 tingkat partisipasi politik masyarakat mengalami

peningkatan meskipun calon Bupati dan Wakil Bupati menghadapi kolom kosong. Kolom kosong sendiri jadi persoalan yang ada di Kabupaten Deli Serdang saat pelaksanaan pilkada. Hal tersebut dikarenakan masyarakat banyak memakai hak suaranya untuk memilih kolom kosong. Meskipun demikian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tentunya memiliki metode-metode demi mendongkrak tingkat keikutsertaan masyarakat untuk memakai hak pilih nya pada pilkada tahun 2018 maupun pilkada selanjutnya yang akan datang. Memaksimalkan peran Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pilkada tentunya akan berakibat meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pilkada.

1.3 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya merupakan karya tulis ilmiah yang sudah dikaji dan diteliti oleh peneliti sebelumnya sebagai bahan acuan dan referensi serta bahan pertimbangan dalam melaksanakan penelitian. Penelitian pertama oleh Putri Ningrum Nilamsari (2018) kesimpulan dari penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum sendiri sudah maksimal dalam hal kinerja pada setiap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Bisa dikatakan demikian karena adanya peningkatan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilihan umum yang diadakan di Kabupaten Luwu. Penelitian kedua oleh Faiz Albar Nasution dan Kushandajani (2018) kesimpulan dari penelitian ini adalah Hierarki keikutsertaan masyarakat Kecamatan Medan Maimun pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 yang mendominasi dalam partisipasi pemberian suara dan apatis total. Penelitian Ketiga oleh Muhammad Choirullah Pulungan, Mudiwati Rahmatunnisa dan Ari Ganjar Herdiansah (2019) kesimpulan penelitian ini adalah adanya sosialisasi yang besar-besaran, luas dan tertuju ke berbagai lapisan masyarakat dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi. Koordinasi KPU Kota Bekasi dengan tingkat penyelenggara di bawah seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berjalan dengan baik mengoptimalkan sosialisasi terhadap pemilih.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan referensi dan perbandingan ketiga penelitian tersebut peneliti akan mencoba lebih mendetail pada bagaimana peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat serta faktor yang menghambat partisipasi politik masyarakat dalam pilkada.

1.5 Tujuan

tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat serta faktor yang menghambat partisipasi politik masyarakat dalam pilkada.

II. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dalam mencari dan mengumpulkan data peneliti menggunakan cara wawancara, dokumentasi, dan Audio Visual. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori peranan menurut Soerjono Soekanto dalam Teori Peranan (2002) yang menyebutkan bahwa terdapat 4 dimensi dalam peranan yaitu aspek dinamis dari kedudukan, perangkat hak-hak dan kewajiban, perilaku sosial dari pemegang kedudukan serta bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deli Serdang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis, Kabupaten Deli Serdang berada pada posisi 2⁰⁵⁷ LU, 3⁰¹⁶ LS dan

98⁰³³” BT sampai 99⁰²⁷” BT dengan ketinggian wilayah 0 – 1.000 m dpl. Administrasi pemerintahan Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 kecamatan dan 394 desa /kelurahan yang terdiri dari 78 desa swakarya mula, 6 swakarya madya, 285 desa swasembada mula dan 25 desa swasembada madya yang seluruhnya telah definitif.

Tabel 1

Jumlah Desa dan Kelurahan tiap Kecamatan serta Nama Ibukota Kecamatan dan Jarak Ibukota Kecamatan ke Lubuk Pakam

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa Definitif		Jarak Ibukota Kec. Ke Lubuk Pakam (Km)
			Desa	Kelurahan	
1	Gunung Meriah	Gunung Meriah	12	-	65
2	STM. Hulu	Tiga Juhar	20	-	51
3	Sibolangit	Bandar Baru	30	-	61
4	Kutalimbaru	Kutalimbaru	14	-	50
5	Pancur Batu	Pancur Batu	25	-	44
6	Namo Rambe	Namo Rambe	36	-	46
7	Biru – Biru	Biru – Biru	17	-	53
8	STM. Hilir	Talun Kenas	15	-	37
9	Bangun Purba	Bangun Purba	24	-	25
10	Galang	Galang	28	-	18
11	Tj. Morawa	Tj. Morawa	25	1	12
12	Patumbak	Patumbak	8	3	30
13	Deli Tua	Deli Tua	3	-	38
14	Sunggal	Sunggal	17	-	40
15	Hampan Perak	Hampan Perak	20	-	52
16	Labuhan Deli	Helvetia	5	2	50
17	Percut Sei Tuan	Tembung	18	-	41
18	Batang Kuis	Batang Kuis	11	-	11
19	Pantai Labu	Pantai Labu	19	-	10
20	Beringin	Beringin	11	7	6
21	Lubuk Pakam	Lubuk Pakam	6	-	- 4
22	Pagar Merbau	Pagar Merbau	16	-	
Jumlah			380	14	

Sumber: Deli Serdang Dalam Angka, 2021

Tahun 2018 jumlah penduduk Deli Serdang adalah 1.886.388 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 755 jiwa per km². Jumlah rumah tangga sebanyak 452.398 rumah tangga dan setiap rumah tangga rata-rata dihuni oleh 4-5 jiwa, sedangkan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2000–2010 sebesar 2,62 persen. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2018 lebih banyak dari penduduk perempuannya dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,3 yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Bila dilihat per kecamatan maka Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar dengan tingkat persebaran penduduk sebesar 21,49 persen sedangkan Kecamatan Gunung Meriah adalah yang terkecil yaitu 0,14 persen. Untuk Kecamatan terpadat urutan pertama adalah Kecamatan Deli Tua disusul Sunggal dengan kepadatan di atas 2700 jiwa per km² dan yang terjarang adalah Kecamatan Gunung Meriah yang hanya 34 jiwa per km².

Data mengenai Jumlah daftar pemilih tetap dalam Pilkada tahun 2018 di Kabupaten Deli Serdang disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3

Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 di Kabupaten Deli Serdang

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Gunung Meriah	12	12	973	1.007	1.980
2	STM. Hulu	20	48	4.422	4.553	8.975
3	Sibolangit	30	74	6.046	7.257	14.203
4	Kutalimbaru	14	125	12.540	13.335	25.875
5	Pancur Batu	25	252	32.119	34.045	66.164
6	Namorambe	36	130	13.206	13.974	27.180
7	Biru-Biru	17	115	12.176	12.788	24.964
8	STM.Hilir	15	105	11.045	11.311	22.356
9	Bangun Purba	24	100	7.932	8.078	16.010
10	Galang	29	195	24.315	25.564	29.879
11	Tanjung Morawa	26	639	69.342	70.414	139.756
12	Patumbak	8	297	34.878	35.002	69.880
13	Deli Tua	6	190	21.387	22.802	44.189
14	Sunggal	17	811	97.529	100.393	197.922
15	Hampanan Perak	20	434	53.490	52.732	106.222
16	Labuhan Deli	5	203	20.108	19.839	39.947
17	Percut Sei Tuan	20	1250	142.160	142.692	284.852
18	Batang Kuis	11	157	19.785	19.742	39.527
19	Pantai Labu	19	143	17.510	17.117	34.627
20	Beringin	11	171	20.699	20.929	41.628
21	Lubuk Pakam	13	277	30.222	32.071	62.293
22	Pagar Merbau	16	104	13.349	13.622	26.971
TOTAL		394	5.832	666.133	679.267	1.345.400

Sumber: KPU Deli Serdang, 2018

Data mengenai tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Deli Serdang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 yaitu:

Tabel 4

Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang tahun 2018

Pemilihan	Suara Sah dan Tidak Sah	Jumlah DPT	Persentase
Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang	720.085	1.345.400	61,77%

Sumber: KPU Deli Serdang, 2018

Tabel diatas menggambarkan bahwa diketahui partisipasi politik masyarakat pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Deli Serdang adalah sebesar 61,77%. Ini menunjukkan bahwa partisipasi pemilih sudah meningkat bila dibandingkan tahun 2013. Hal ini menunjukkan peranan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yakni pemegang kedudukan sebagai penyelenggara pemilihan umum telah melaksanakan tugas dengan baik. Dengan menjangkau daerah yang sebelumnya tidak terjangkau dan juga lebih banyak mengadakan sosialisasi di lingkungan masyarakat terutama pemilih pemula. Pada tahun 2013 partisipasi pemilih hanya mencapai 37%. Partisipasi pemilih yang semakin meningkat menunjukkan semakin meningkatnya pula kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi. Hal ini merupakan salah satu target KPU Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dibanding tahun sebelumnya dan harus ditingkatkan serta dipertahankan untuk pemilihan umum selanjutnya.

3.1 Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Peneliti melakukan analisis sesuai pada kegiatan penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 16 Januari 2022 lalu dapat menganalisis berdasarkan landasan teori oleh Soerjono Soekanto, 2002 mengemukakan bahwa peranan mempunyai dimensi yaitu aspek dinamis dari kedudukan, perangkat hak-hak dan kewajiban, perilaku sosial dari pemegang kedudukan serta bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang. Berdasarkan dari teori ini telah mampu mendukung dari peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan rendahnya partisipasi politik masyarakat.

3.1.1 Aspek Dinamis Dari Kedudukan

Komisi Pemilihan Umum memiliki kedudukan sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan independen. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU telah melakukan fungsinya tanpa terputus dan dalam penyelenggaraan pemilihan umum, KPU tidak boleh mendapat intervensi dari pihak mana pun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

3.1.2 Perangkat Hak – Hak Dan Kewajiban

Hak dan kewajiban menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hak merupakan segala sesuatu yang melekat pada diri seseorang dan memang pantas untuk ia terima. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang memang wajib dilakukan individu untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Diantara hak dan kewajiban, masing-masing berjalan beriringan sehingga keduanya harus dilaksanakan oleh setiap individu. Hal yang terpenting dalam menjalankan kedua hal tersebut adalah masing-masing individu menyadari bagaimana peran dan kedudukannya sebagai anggota dari masyarakat.

3.1.3 Perilaku Sosial Dari Pemegang Kedudukan

Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum sebagai pemegang kekuasaan penuh atas penyelenggaraan Pilkada tentunya harus menampilkan perilaku sosial yang baik. Dimana masyarakat yang menjadi penilai dan juga menaati apapun kebijakan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pilkada. Di samping hal tersebut penyelenggaraan Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum diawasi oleh Badan Pengawas

Pemilihan Umum. BAWASLU sendiri merupakan lembaga penyelenggaraan Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. BAWASLU diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Adanya BAWASLU merupakan sebuah keharusan karena selain dari pihak KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum tentunya diperlukan adanya pihak yang mempunyai peran sebagai pengawas dan dalam hal ini BAWASLU diberikan amanat tersebut.

3.1.4 Bagian Dari Aktivitas Yang Dimainkan Seseorang

Peranan KPU sendiri yang merupakan bagian dari aktivitas mereka dalam menjalankan tugasnya tentu sangat berpengaruh dalam hasil kinerja mereka yang dalam hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2018. Tentunya semakin mereka aktif dan bekerja dengan maksimal hasil kinerja mereka juga akan berdampak pada partisipasi politik masyarakat tersebut.

3.2 Faktor Yang Menghambat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada

Beberapa faktor yang sangat mempengaruhi terhadap partisipasi politik masyarakat pada Pilkada antara lain: tingkat pengetahuan, pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan, peran aparat pemerintahan, pengaruh kaum intelektual, konflik diantara pemimpin.

3.2.1 Tingkat Pengetahuan

Tingkat pengetahuan terhadap politik sangat penting, hal ini dapat mempengaruhi apakah masyarakat akan ikut serta dalam politik atau sebaliknya. Dengan pengetahuan yang baik, tentunya orang akan lebih mudah memahami pentingnya politik dan ikut serta di dalamnya. sebaliknya, ketika seseorang memiliki pengetahuan yang sedikit akan politik, maka ia akan acuh dan tidak peduli terhadap politik.

3.2.2 Pekerjaan Masyarakat

Tingkat pengetahuan dan pekerjaan masyarakat ini merupakan faktor internal, atau faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Biasanya orang dengan jenis pekerjaan tertentu membuat mereka dapat menjadi lebih peduli terhadap politik, atau malah sebaliknya, menjadi lebih jauh dari partisipasi politik. Misalnya, seorang guru umumnya memiliki tingkat kepedulian terhadap politik dibandingkan pemulung.

3.2.3 Tingkat Pendidikan

Selain dua faktor sebelumnya, tingkat pendidikan juga termasuk dalam faktor internal. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik juga memahami politik itu sendiri. Terlebih bagi pemilih yang buta huruf, akan sangat sulit baginya ketika mengenali calon pemimpin atau wakil rakyat atau sulit pula ketika pemungutan suara berlangsung.

3.2.4 Peran Aparat Pemerintahan

Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi politik adalah peran aparat pemerintahan. Mereka seharusnya memberikan edukasi pada masyarakat terkait politik dan mempermudah akses terhadap pengetahuan atas politik tersebut. Penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum harus dapat mengakomodasi para pemilih, termasuk pemilih yang berkebutuhan khusus.

3.2.5 Pengaruh Kaum Intelektual

Pada era informasi sekarang ini, sangat mudah rasanya menyebarkan berbagai ide, pikiran, gagasan, dan sebagainya. Banyak di antara kaum intelektual bidang politik yang menyampaikan opininya terhadap suatu permasalahan politik tertentu di berbagai media. Bagi para konsumen media, hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi politik mereka, atau bahkan sebaliknya, membuat mereka semakin antipati terhadap politik.

3.2.6 Konflik Diantara Pemimpin

Sudah umum diketahui, dengan banyaknya partai politik di Indonesia dan berbedanya tujuan serta metode mereka dalam mencapai tujuannya, akan banyak terjadi konflik politik. Para pemimpin politik berlomba untuk mendapatkan dukungan dari rakyat yang sebesar-besarnya. Kader-kader mereka nantinya akan merekrut sebanyak-banyaknya warga negara untuk memberikan dukungan pada pemimpin mereka. Hal ini tentunya dapat meningkatkan partisipasi politik dalam suatu negara.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian pertama oleh Putri Ningrum Nilamsari (2018) menunjukkan bahwa ternyata KPU sendiri sudah maksimal dalam hal kinerja pada setiap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Bisa dikatakan demikian karena adanya peningkatan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilihan umum yang diadakan di Kabupaten Luwu. Penelitian kedua oleh Faiz Albar Nasution dan Kushandajani (2018) ini menunjukkan bahwa Hierarki keikutsertaan masyarakat Kecamatan Medan Maimun pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 yang mendominasi dalam partisipasi pemberian suara dan apatis total. Penelitian ketiga oleh Muhammad Choirullah Pulungan, Mudiwati Rahmatunnisa dan Ari Ganjar Herdiansah (2019) menemukan bahwa adanya sosialisasi yang besar-besaran, luas dan tertuju ke berbagai lapisan masyarakat dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi. Koordinasi KPU Kota Bekasi dengan tingkat penyelenggara di bawah seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berjalan dengan baik mengoptimalkan sosialisasi terhadap pemilih. Peran media sosial juga sangat membantu dalam rangka peningkatan partisipasi politik masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Peranan KPU sendiri yang merupakan bagian dari aktivitas mereka dalam menjalankan tugasnya tentu sangat berpengaruh dalam hasil kinerja mereka yang dalam hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2018. Tentunya semakin mereka aktif dan bekerja dengan maksimal hasil kinerja mereka juga akan berdampak pada partisipasi politik masyarakat tersebut. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan KPU Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dimana setiap indikator menjelaskan bagaimana kinerja KPU sendiri dalam menjalankan perannya. Peneliti dapat mengatakan bahwa dari pihak KPU sendiri telah menjalankan perannya yakni menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan baik karena target mereka dengan menjangkau daerah terpencil yang sebelumnya tidak mendapatkan sosialisasi tentang pelaksanaan pilkada telah berhasil dilakukan walaupun masih belum maksimal. Dan juga keseimbangan antara hak dan kewajiban telah mereka laksanakan dengan baik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). penulis memfokuskan hasil dari penelitian ini untuk menjelaskan lebih tentang peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang

dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat serta menemukan solusi terhadap permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan tugas dari KPU itu sendiri.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani. (2007). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Persada Karya.

Amirudin & A.Zainal Bisri. (2005). *Pilkada Langsung Problem dan Prospek* (hal 25-26). Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Budiarjo, Mirriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Creswell, J. W. (1990). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. *Mycological Research*, 94(4), 522

Duverger, Maurice. 2010. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (2013). *Political Participation by the Poor*. In *No Easy Choice* (pp. 173-174). Harvard University Press.

Masyhuri, M. Z. (2008). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Moleong. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Sitepu, P. A. (2012). *Studi Ilmu Politik*. Graha Ilmu.

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet.

Soekanto. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Thoha, M. (2013). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 4 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017

